

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
 EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG SELATAN**

Oleh

Futri Safitri

Uin Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail : Futrisafitri07@gmail.com

Abstract

Performance-based budgeting is one of the budget preparations that is oriented towards the achievement of work results by allocating existing resources to be efficient, effective and economic. However, in reality, there are problems with the low absorption of the budget accompanied by a decrease in the percentage that occurred at the Department of Population and Civil Registration of South Tangerang City. This study aims to determine whether there is an effect of the implementation of performance-based budgeting on the effectiveness of budget realization. This research was conducted at the Department of Population and Civil Registration of South Tangerang City. The method used is a quantitative method. The collection of data and information was carried out through questionnaires or questionnaires as a research tool which was distributed to all employees of the Department of Population and Civil Registration of South Tangerang City. The analysis used in this study uses validity, reliability, descriptive analysis, Spearman rank correlation analysis, simple regression analysis, coefficient of determination and t test. The results of this study indicate that there is a positive and significant influence between performance-based budgeting on the effectiveness of budget realization.

Keywords: Implementation of Performance-Based Budgeting, Budget Realization Effectiveness

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah Indonesia memiliki salah satu cita-cita yang mana senantiasa memajukan kesejahteraan umum, seperti yang telah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa, pemerintah Indonesia haruslah melaksanakan roda pemerintahannya dengan baik dan juga melaksanakan pembangunan di segala bidang yang mana dapat memberikan fasilitas serta pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat luas.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat ini, pemerintah pusatpun menerapkan sistem desentralisasi, yang mana sistem desentralisasi ini pemerintah pusat telah melimpahkan kekuasaan kepada setiap daerah otonom untuk

mengatur urusannya sendiri tidak terkecuali dalam urusan keuangannya. Hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal suatu pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, oleh sebab itu dalam proses penyusunan keuangan daerah yang mana bermula dari konsep anggaran tradisional beralih ke konsep *new public management*. Konsep *new public management* ini lebih menekankan kepada kinerja bukan kepada kebijakannya. Konsep ini diharapkan menjadi suatu harapan baru dalam berlangsungnya kegiatan keuangan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Anggaran beebasis

kinerja ini lahir sebagai salah satu perbaikan terhadap proses penganggaran terdahulu, yang mana penganggaran terdahulu terdapat banyaknya kelemahan dalam pelaksanaan anggarannya, salah satunya yakni belum terdapatnya tolok ukur kinerja yang baku dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi suatu acuan untuk untuk mengadakan perbaikan dalam proses penganggaran.

Dalam penerapan program yang sesuai dengan visi, misi serta tujuan suatu organisasi, diperlukan anggaran sebagai sarana penunjang. Sementara itu, baik organisasi pemerintah ataupun swasta memerlukan laporan kinerja guna memastikan sukses atau tidaknya organisasi. Untuk menggapai tujuan yang sudah ditetapkan, organisasi/ lembaga diwajibkan menggunakan anggaran berbasis kinerja dalam proses penganggarnya, dimana anggaran tersebut digunakan untuk membiayai tiap program/ kegiatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan sudah menjalankan anggaran berbasis kinerja pada penataan anggarannya. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja sudah diresmikan dalam Permendagri Nomor. 13 Tahun 2006 serta diubah lagi dengan Permendagri Nomor. 59 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2018) dalam mendapatkan tujuan serta sasaran pelayanan publik, suatu anggaran disusun dengan pendekatan kinerja guna menanggulangi bermacam kelemahan yang ada dalam anggaran tradisional, paling utama kelemahan yang diakibatkan oleh tidak terdapatnya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Penganggaran berbasis kinerja menyalurkan kekuatan sumber daya tidak hanya ke unit organisasi tetapi juga ke program dan menggunakan pengukuran keluaran sebagai indikator kinerja organisasi. Dalam penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan tiap pendanaan yang dituangkan dalam aktivitas dengan keluaran serta hasil

yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam menggapai keluaran tersebut dengan memakai tata cara penganggaran berbasis kinerja. Oleh sebab itu dengan terdapatnya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai .

Bastian mengatakan *performance budgeting* ialah suatu teknik penyusunan anggaran dimana anggaran tersebut berdasarkan dengan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan biaya unit (*unit cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur. Pencapaian tujuan, program , dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen itu semua merupakan struktur awal. Tingkat keberhasilan program, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif telah dijamin oleh penyusunan anggaran. Mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas ialah yang mana penetapan pengukuran *output* dikaitkan dengan biaya. Hal ini sekaligus merupakan alat untuk dapat menjalankan prinsip akuntabilitas, sebab yang diterima oleh masyarakat pada akhirnya ialah *output* dari suatu proses kegiatan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran berbasis kinerja didasarkan pada peraturan tersebut. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) telah disusun dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, RKA- SKPD diharapkan bisa menciptakan *output* yang maksimal guna memenuhi kebutuhan anggaran berbasis kinerja. Sehingga dapat menghasilkan hasil yang efisien, efektif serta ekonomis dalam penerapan serta pencapaian anggaran berbasis kinerja. Kemudian dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja ini, pemerintah dituntut untuk membuat standar kinerja yang jelas dimana standar kinerja menjadi acuan

anggaran kegiatan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan, biaya yang diperlukan dan hasil yang diperoleh.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dituntut harus merencanakan anggaran dengan baik serta diharapkan untuk bisa membuat laporan keuangan sebagai keluaran atau *output* atas kegiatan yang diselenggarakan atau yang telah dilakukan selama satu periode yang dimana hal ini nantinya akan dipertanggung jawabkan. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, dengan menganalisis terhadap data yang telah didapatkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, ditemukanlah beberapa masalah. Pertama ditemukanlah masalah yang mana realisasi anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan belum mencapai 100% anggaran yang ada. serta adanya presentase yang dapat dilihat mengalami penurunan pada tahun 2019. Adapun perbandingan realisasi penyerapan anggaran dari tahun 2017-2019, sebagai berikut :

Tabel 1. Data Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
2017	18.262.332.000,00	17.855.935.329,00	97,77
2018	15.891.565.000,00	15.379.206.106,00	96,78
2019	14.529.222.000,00	14.010.389.831,00	96,43

Sumber : LRA Disdukcapil Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2019

Di lihat dari tabel diatas, diketahui bahwa Pada tahun 2017 realisasi anggaran mencapai Rp. 17,855,935,329.00 dengan presentase 97,77 %. Sedangkan Pada tahun 2018 mengalami penurunan realisasi anggaran mencapai Rp. 15.379.206.106,- dengan presentase 96,78%. Dan pada tahun 2019 menurun realisasi anggaran mencapai Rp. 14.010.389.831,- dengan presentase 96,43%. Jika dilihat dari data tersebut bahwa realisasi anggaran tidak terserap hingga 100% bahkan bisa dilihat adanya penurunan di tiap

tahunnya. Berlandaskan pada wawancara yang mana dilakukan oleh penulis, hal tersebut disebabkan oleh penggunaan anggaran yang mana dilaksanakan sefisien mungkin, maka menjadikan anggaran yang telah dialokasikan tidak terealisasi secara menyeluruh, serta penemuan harga yang mana harga ketika dilapangan lebih miring dibandingkan harga yang telah ditetapkan dalam standar biaya minimum hal tersebut pula menjadi pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran. Oleh karena itu anggaran yang telah direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tidak terserap semua. Permasalahan kedua yang ditemukan, masih belum maksimalnya realisasi program yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang mana masih ditemukannya presentase di bawah angka 80% dalam realisasi program tersebut. Oleh karena itu hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan yang telah diberikan oleh bidang keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang kinerja keuangan instansi tersebut dikatakan sangat baik karena mencapai angka 80% dalam perealisasiannya. Tidak hanya itu, ditemukanlah program yang realisasinya belum mencapai minimal 95% bahkan 100% hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 258/PMK.02 Tahun 2015 yang berisi mengenai Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 2. Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

Misi	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Manajemen Administrasi Kependudukan	5.463.885.000,00	5.215.484.289,00	95,42
	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	435.146.000,00	435.146.000,00	100
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi	Pengembangan Kemampuan Sistem Informasi dan Media Massa	378.401.000,00	378.871.000,00	99,71
	Perencanaan Pembangunan Daerah	506.900.000,00	491.485.000,00	97,11
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	52.900.000,00	52.800.000,00	100
	Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	149.950.000,00	113.314.000,00	76,02
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi	Manajemen Administrasi dan Sistem Informasi	7.541.836.000,00	7.328.398.503,00	97,17
	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	14.529.222.000,00	14.010.389.831,00	96,43

Sumber : LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada salah satu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, diketahui bahwa penyebab program yang dilaksanakan belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal yaitu dikarenakan adanya kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik, kurangnya partisipasi sumber daya manusia yang mana menjadi sasaran serta adanya keterbatasan waktu dalam melaksanakan program ataupun kegiatan sehingga pelaksanaan program tersebut kurang optimal.

Oleh karena itu, atas permasalahan yang ada mengenai realisasi penyerapan anggaran tahun 2017-2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada penelitian ini, perlu dikaji lebih mendalam apakah anggaran berbasis kinerja mempengaruhi atas efektivitas realisasi anggaran. Maka dari itu dapat diuraikan dan penulis teliti persoalan yang ada dengan menggunakan dimensi yang relevan atas teori anggaran berbasis kinerja serta efektivitas realisasi anggaran.

Untuk lebih mudah membedah persoalan yang ada menggunakan Gagasan teori anggaran berbasis kinerja oleh (Bastian, 2010) yang mana menyatakan bahwa *performance budgeting* ialah suatu teknik penyusunan anggaran dimana anggaran tersebut berdasarkan dengan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan biaya unit (*unit cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur. Pencapaian tujuan, program, dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen itu semua merupakan struktur awal. Tingkat keberhasilan program, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif telah dijamin oleh penyusunan anggaran. Mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas ialah yang mana penetapan pengukuran output dikaitkan dengan biaya. Adapun dimensi anggaran berbasis kinerja sebagai berikut:

1. Efisiensi, efisiensi ini terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau

pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang dihasilkan yang mana digunakan untuk menghasilkan output tersebut.

2. Ekonomi, indikator ekonomi ini merupakan indikator mengenai tentang input.

3. Efektivitas, indikator ini menunjukkan mengenai kesuksesan ataupun kegagalan dalam pencapaian suatu tujuan.

Sedangkan menurut Halim (2012) efektivitas ialah suatu tingkatan pencapaian hasil program kerja dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu perbandingan yang mana perbandingan antara output dengan outcome. Dimana outcome ini sering kali dikaitkan dengan tujuan atau target yang akan dicapai. Adapun dimensinya menurut (Hasibuan, 2003) yaitu kuantitas, kualitas dan pemanfaatan waktu. Adapun teori penghubung anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran yang mana telah di kemukakan oleh Halim (2012) yaitu efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan pencapaian kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, dapat diartikan pula mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah direncanakan. Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif.

Oleh sebab itu teori serta dimensi ini digunakan oleh peneliti untuk mengukur seberapa besar anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektivitas realisasi anggaran, serta untuk memecahkan persoalan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

Adapun penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung (Anggraeni & Saleh, 2020) menjelaskan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bandung.

Penelitian lain dari (Wongkar, Senduk, & Tanor, 2021) yang berjudul “ Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di Kabupaten Minahasa” penelitian tersebut membahas mengenai bahwa adanya pengaruh positif anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Agar kinerja aparatur pemerintah daerah tetap dapat ,menghasilkan kinerja yang maksimal untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik maka pemerintah harus terus memperhatikan setiap anggaran yang dikeluarkan untuk setiap SKPD, peningkatan kinerja dari aparatur pemerintah memberikan dampak terhadap besaran anggaran yang ada.

Penelitian sebelum lainnya dari (Kurniasari, Kurniasari, & Marta, 2017) berjudul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat”. ternyata sangat tinggi dalam mencapai efektivitas pengendalian anggaran. Dalam memperhatikan aspek *performance-based budgeting* beserta dimensinya, diperlukan suatu pengendalian organisasi. Dengan demikian anggaran yang ditetapkan oleh organisasi berbasis sistem yang efektif, efisien dan ekonomis dapat terjaga dengan baik. Terdapat pula pengaruh dimensi efektif, efisien dan ekonomis secara parsial dan simultan terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada DPPKAD Kabupaten Bandung Barat.

Oleh karena itu yang menjadi perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai pengetahuan mengenai anggaran berbasis kinerja dan efektivitas realisasi anggaran. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu mengetahui bahwa antara variabel terikat yaitu efektivitas realisasi

anggaran dengan variabel bebas yaitu anggaran berbasis kinerja ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan diantara dua variabel tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Penelitian menggunakan asosiatif ini sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019) bahwa suatu metode penelitian yang mempunyai tujuan untuk bisa menganalisis dampak dari satu variabel dengan variabel lainnya disebut penelitian asosiatif karena peneliti menggunakan dua variabel dalam penelitian ini, yaitu anggaran berbasis kinerja (X) selaku variabel independen (bebas) serta efektivitas realisasi anggaran (Y) selaku variabel dependen (terikat). Ini berarti penelitian tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh data yang valid dimana data tersebut mengacu pada permasalahan yang empiris dan memungkinkan untuk dilakukan pengukuran variabel penelitian dan untuk menganalisis data yang didapatkan dari teknik pengumpulan data yang kemudian ditampilkan dalam bentuk informasi.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Adapun jangka waktu yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu mulai bualnn Oktober 2021 sampai Maret 2021.

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang berjumlah 94 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Sugiyono (2019) mengatakan bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel jika seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil yang mana jumlah populasi kurang dari 30 orang. Sampling jenuh dapat dikatakan dengan istilah sensus, yang mana dengan menggunakan teknik tersebut seluruh anggota

populasi dijadikan sampel. Sejalan dengan itu jumlah sampel dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah populasi yaitu seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang mana berjumlah 94 orang, maka jumlah sampel sebanyak 94 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket dengan metode survey yang mana dibagikan kepada seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

Analisis data dengan menggunakan skala likert yang mana skala likert digunakan untuk mengukur jawaban atas masing-masing responden. Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan maka dari itu perlu dipahami konsep operasional dan indikator penelitian pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Skala
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X)	1. Efektif	Likert
	2. Efisien	Likert
	3. Ekonomis	Likert
Efektivitas Realisasi Anggaran (Y)	1. Kuantitas	Likert
	2. Kualitas	Likert
	3. Pemanfaatan Waktu	Likert

Uji kualitas data dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji validitas, reliabilitas dan analisis deskriptif. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas. Kemudian metode analisis data yang digunakan ialah regresi linier sederhana, metode ini digunakan karena hanya ada satu variabel independen. Serta penulis juga menggunakan uji determinasi (R²) dan uji hipotesis (t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari tiap variabel yang diteliti. Berikut variabel penerapan anggaran berbasis kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Nilai Batas Kategori Tanggapan Responden Mengenai Variabel Anggaran Berbasis Kinerja

Dimensi	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Jumlah Klasifikasi	Klasifikasi	
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	357	411	5	91% - 100%	Sangat Baik
				81% - 90%	Baik
				65% - 80%	Cukup Baik
				55% - 64%	Kurang Baik
				0% - 54%	Tidak Baik
Hasil dari tingkat capaian responden pada variabel anggaran berbasis kinerja				81,9%	
Kategori jawaban responden terhadap variabel penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan adalah Baik					

Dapat dilihat tabel diatas bahwa kategori pada variabel penerapan anggaran berbasis kinerja ialah 81,9% yang mana terletak pada rentang 81% sampai 90%, dengan demikian, yang mana hasil tersebut dihasilkan melalui penyebaran kuesioner maka dapat ditarik kesimpulan penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan sudah berjalan dengan **baik**.

Sedangkan untuk nilai batas kategori variabel efektivitas realisasi anggaran disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. Nilai Batas Kategori Tanggapan Responden Mengenai Variabel Efektivitas Realisasi Anggaran

Dimensi	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Jumlah Klasifikasi	Klasifikasi	
Efektivitas Realisasi Anggaran	380	412	5	91% - 100%	Sangat Baik
				81% - 90%	Baik
				65% - 80%	Cukup Baik
				55% - 64%	Kurang Baik
				0% - 54%	Tidak Baik
Hasil dari tingkat capaian responden pada variabel efektivitas realisasi anggaran				84,7%	
Kategori jawaban responden terhadap variabel penerapan efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan adalah Baik					

Dapat dilihat tabel diatas bahwa kategori pada variabel penerapan anggaran berbasis kinerja ialah 84,7% yang mana terletak pada rentang 81% sampai 90%, dengan demikian yang mana hasil tersebut dihasilkan melalui penyebaran kuesioner maka dapat ditarik kesimpulan

efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan sudah **baik**.

b. Uji Validitas

Uji validitas ini digunakan untuk menguji pernyataan atau pertanyaan pada kuesioner yang mana kuesioner tersebut telah disebar valid atau tidak valid. Dengan perhitungannya membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} . Setelah penulis melakukan uji validitas dengan menggunakan SPSS Versi.22 dan dibandingkan antara r_{hitung} dengan r_{tabel} dicari pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan $N=94$, sehingga didapatkan r_{tabel} 0,2028. hasil uji validitas dari seluruh item penerapan anggaran berbasis kinerja dan efektivitas realisasi anggaran melalui perhitungan SPSS Versi.22 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Butir	r_{hitung}	r_{tabel}	keterangan
1	0,301	0,2028	VALID
2	0,363	0,2028	VALID
3	0,229	0,2028	VALID
4	0,464	0,2028	VALID
5	0,368	0,2028	VALID
6	0,330	0,2028	VALID
7	0,503	0,2028	VALID
8	0,412	0,2028	VALID
9	0,482	0,2028	VALID
10	0,437	0,2028	VALID
11	0,317	0,2028	VALID
12	0,365	0,2028	VALID
13	0,681	0,2028	VALID

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Realisasi Anggaran

Butir	r_{hitung}	r_{tabel}	keterangan
1	0,534	0,2028	VALID
2	0,308	0,2028	VALID
3	0,412	0,2028	VALID
4	0,409	0,2028	VALID
5	0,565	0,2028	VALID
6	0,666	0,2028	VALID
7	0,636	0,2028	VALID
8	0,666	0,2028	VALID

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk masing-masing pernyataan variabel penerapan anggaran berbasis kinerja (x) dan variabel efektivitas realisasi anggaran (y) seluruh butir terbukti valid, karena nilai r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} . Dengan nilai r_{tabel} adalah 0,2028.

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengajukan validitas instrumen-instrumen yang valid umumnya reliabel, suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan kuesioner penelitian ini reliabel atau tidak mengikuti ketentuan yang mana ketentuan tersebut dikemukakan oleh (Wiratna, 2014) bahwa nilai reliabilitas yang dapat diterima menggunakan alpha cronbach $> 0,60$, sedangkan bila alpha cronbach $< 0,60$ menunjukkan bahwa data tersebut tidak reliabel. Adapun reliabilitas dari masing-masing variabel hasilnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	alpha cronbach's	Batas Reliabilitas	Kriteria
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X)	0,617	0,60	Reliabel
Efektivitas Realisasi Anggaran (Y)	0,615	0,60	Reliabel

d. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Cara yang ditempuh untuk menguji kenormalan data ialah menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* ini dapat dihitung jika nilai signifikansi atau nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 9. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.98833110
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.078
Kolmogorov-Smirnov Z		.986
Asymp. Sig. (2-tailed)		.285

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Asymp.Sig.(2-tailed)* sebesar 0,285 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi **normal**.

e. Analisis Korelasi Spearman Rank

Analisis Korelasi Spearman Rank ini biasa digunakan untuk menghitung ataupun mengukur hubungan antara satu variabel independen (anggaran berbasis kinerja) dengan satu variabel dependen (efektivitas realisasi anggaran). Oleh karena itu berdasarkan hasil analisis dengan melalui software SPSS Versi. 22 di perolehlah hasil sebagai berikut :

Tabel 10. Hasil Uji Analisis Korelasi Spearman Rank

Correlations				
			ANGGARAN BERBASIS KINERJA	EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN
Spearman's rho	ANGGARAN BERBASIS KINERJA	Correlation Coefficient	1	.567**
		Sig. (2-tailed)		0
	EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN	Correlation Coefficient	.567**	1
		Sig. (2-tailed)	0	
	N		94	94

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 11. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2019:184)

Dapat dilihat dari tabel 10 hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS Versi. 22, diperoleh hasil nilai korelasi antara anggaran berbasis kinerja dan efektivitas realisasi anggaran sebesar 0,567. yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang karena nilai koefisien korelasi berada di antara 0,40 - 0,599. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel independen (anggaran berbasis kinerja) dengan variabel dependen (efektivitas realisasi anggaran) memiliki hubungan yang **sedang**.

f. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau hubungan secara linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Oleh karena itu berdasarkan hasil dari pengolahan data yang mana dengan menggunakan bantuan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 12. Hasil Uji regresi linier

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.102	3.098		3.583	0.001
ANGGARAN BERBASIS KINERJA	0.428	0.058	0.609	7.365	0

a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN

Dapat dilihat dari tabel 9 bahwa nilai konstanta (a) yaitu sebesar 11,102 dan nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,428. maka dari itu didapatlah persamaan regresi linier sederhana yaitu : $Y = 11,102 + 0,428 X$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Konstanta sebesar 11,102 yang mana nilai tersebut dapat diartikan jika penerapan anggaran berbasis kinerja (X) nilainya 0, maka efektivitas realisasi anggaran (Y) nilainya 11,102.
2. Jika penerapan anggaran berbasis kinerja mengalami kenaikan 1, maka nilai variabel dependen mengalami peningkatan sebesar 0,428.

Maka dapat disimpulkan bahwa jika nilai anggaran berbasis kinerja mengalami peningkatan nilai dari efektivitas realisasi anggaran juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya begitu ketika nilai dari anggaran berbasis kinerja menurun nilai efektivitas realisasi anggaranpun ikut menurun juga.

g. Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari variabel independen yang ada menjelaskan variabel dependen. Dari hasil uji analisis regresi linier dapat diperoleh output model summary sebagai berikut :

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.609 ^a	0.371	0.364	1.999

a Predictors: (Constant), ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Dapat dilihat dari tabel diatas diperoleh angka R Square sebesar 0,371 atau 37,1%. hal ini dapat menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen anggaran berbasis kinerja terhadap variabel dependen efektivitas realisasi anggaran sebesar 37,1%. sedangkan sisanya sebesar 62,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R yaitu 0,609 yang mana dikenal dengan istilah koefisien korelasi.

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,609)^2 \times 100\% = 37,1\%$$

Tabel 14. Hasil Koefisien Determinasi

0% ≤ KD ≤ 100%	Tingkat Hubungan
81% - 100%	Sangat Tinggi
49% - 80%	Tinggi
17% - 48%	Cukup Tinggi
5% - 16%	Rendah Tapi Pasti
0% - 4%	Lemah Sekali

Berdasarkan tabel diatas jelas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi yang telah di hitung sebesar 37,1% masuk dalam kriteria pengaruh cukup tinggi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup tinggi antara Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Realisasi Anggaran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

h. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Hipotesis ini diuji dengan uji-t yang mana jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan jika signifikansi $< 0,05$ (5%) maka artinya terhadap pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Diketahui nilai t tabel sebesar 1,66159 berikut inilah hasil Uji Hipotesis (Uji T) melalui software SPSS Versi.22 :

Tabel 15. Hasil Pengujian Hipotesis T

Model	Coefficients				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	11.102	3.098		3.583	0.001	
ANGGARAN BERBASIS KINERJA	0.428	0.058	0.609	7.365	0	

a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan hasil uji diatas diketahui nilai uji t_{hitung} sebesar 7,365 $>$ 1,66159 dan nilai signifikasinya sebesar 0,001 $<$ 0,05. Maka hasil penelitian ini dapat menerima hipotesis yaitu “Terdapat pengaruh positif antara variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X) Terhadap Variabel Efektivitas Realisasi Anggaran” .

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Realisasi Anggaran

Berdasarkan dari hasil uji menggunakan software SPSS Versi.22 dapat diketahui dalam uji normalitas bahwa seluruh variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X) Terhadap Efektivitas Realisasi Anggaran (Y) berdistribusi normal, dilihat dari hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* menunjukkan hasil nilai signifikansi

Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,285 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05.

Berdasarkan hasil uji Regresi Linier Sederhana, didapatkan bahwa nilai konstanta 11,102 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,428. Maka didapatkan persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut : Efektivitas Realisasi Anggaran (Y) = 11,102 + 0,428 X . Perhitungan korelasi spearman rank diperoleh hasil nilai korelasi antara anggaran berbasis kinerja dan efektivitas realisasi anggaran sebesar 0,567. yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang karena nilai koefisien korelasi berada di antara 0,40 - 0,599. Maka hubungan antara variabel independen (anggaran berbasis kinerja) dengan variabel dependen (efektivitas realisasi anggaran) memiliki hubungan yang sedang.

Penulis melakukan perhitungan rumus koefisien determinasi diperoleh hasil bahwa kemampuan variabel independen yaitu anggaran berbasis kinerja (X) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu efektivitas realisasi anggaran (Y) sebesar 37,1%. Sedangkan sisanya 62,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Jadi adanya pengaruh yang cukup tinggi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah melakukan pengujian koefisien determinasi, maka penulis melakukan Uji Hipotesis (T) dengan hasil uji t_{hitung} sebesar $7,365 > 1,66159$ dan nilai signifikasinya sebesar $0,001 < 0,05$. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji T dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_a) diterima atau dengan kata lain Anggaran Berbasis Kinerja (X) Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Variabel Efektivitas Realisasi Anggaran (Y).

Tinggi rendahnya anggaran berbasis kinerja sangat berpengaruh terhadap efektivitas realisasi anggaran karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada keefektifan yang akan dicapai, dimana anggaran berbasis kinerja sendiri menuntut

adanya *output* atau pengeluaran yang beralokasikan secara optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Bastian (2010) dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* yang mengemukakan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi. Dimana anggaran berbasis kinerja sendiri mengalokasikan sumber daya ke program bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output sebagai indikator kinerja organisasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Data primer yang penulis peroleh dari penyebaran kuesioner maka dilakukan pengujian validitas untuk menyatakan valid atau tidaknya data yang diperoleh, serta jawaban reliabilitas untuk mengetahui konsistensi jawaban dari responden dari waktu ke waktu. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa seluruh item dari pernyataan dinyatakan valid dan reliabel. Berdasarkan penelitian yang telah penulis bahas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan ini yang mana dibuktikan dengan besaran t_{hitung} $7,365 > t_{tabel}$ $1,66159$ dan nilai signifikasinya sebesar $0,001 < 0,05$. Adapun penulis menemukan sumbangan pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebesar 37,1%. Sedangkan sisanya 62,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh penulis. Maka dari itu terjadilah pengaruh yang mana cukup tinggi penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang cukup tinggi antara penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran.

Adapun saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait yaitu:

1. Bagi Instansi

Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan penulis mengharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan ataupun acuan yang mana sebagai pengevaluasian anggaran berbasis kinerja, yang paling penting dalam output anggaran yang mana belum mencapai 100%. Selain itu penulis berharap bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan lebih memperjelas secara detail atau terperinci mengenai tujuan program maupun strategi pencapaian tujuan program yang mana berkaitan dengan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Penulis mengharapkan juga adanya pengevaluasian anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

2. Bagi Penulis Selanjutnya

Penulis berharap penulis selanjutnya dapat meneliti lebih mendalam yang mana guna menghasilkan suatu fenomena baru serta keilmuan mengenai anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran yang mana dapat berguna bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar, D. S. (2018). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. *JAWARA: Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 36–44.
- [2] Anggraeni, F., & Saleh, A. S. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)
- [3] Ariwibawa, Y., Rachmina, D., & Falatehan, A. F. (2018). Strategi Peningkatan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1).
- [4] Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- [5] Engkus, Hermawan, E., & Dwi Rahmawati, E. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. *Jurnal Papatung*, 3(2), 27–35.
- [6] Febrina Astria Verasvera. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2), 137–162.
- [7] Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [8] Hasibuan, M. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [9] Kalauw, A. amin. (2018). Pengaruh Kualitas Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Efektivitas Pengendalian Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Maneksi*, 7(2), 94–99.
- [10] Kurniasari, D., Kurniasari, D., & Marta, S. M. (2017). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan

- Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 2, 71–88.
- [11] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- [12] Sahri, H., Agusti, R., & A, A. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 89–103.
- [13] Sofyani, H., & Prayudi, M. A. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja “A.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 54–64.
- [14] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [15] Wiratna, S. V. (2014). *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [16] Wongkar, D. L., Senduk, V., & Tanor, L. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 1–7.
- [17] Yulia, A., & Ningsih, E. S. (2020). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 50–58.